



Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Putri Indah Lestari ¹⁾; Bernadette Robiani ²⁾; Sukanto ³⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Email: ¹⁾ putriindah3006@gmail.com ; ²⁾ soekanto0813@fe.unsri.ac.id ; ³⁾

bernadetterobiani@fe.unsri.ac.id

How to Cite :

Lestari, I, P., Robiani, B., Sukanto, S. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2023]

Revised [20 Juli 2023]

Accepted [30 Juli 2023]

KEYWORDS

Extreme Poverty,
Inequality and Economic
Growth In Indonesia

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi serta pola sebaran Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Kemiskinan Ekstrem itu sendiri. Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif dari TNP2K untuk data kemiskinan ekstrem, dan PDRB masing-masing Provinsi yaitu 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2021-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Tipologi Klassen dan Analisis Korelasi Parsial. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki hubungan yang kuat dengan ketimpangan ekonomi. Serta hubungan antara Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel kontrol tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the conditions and distribution patterns of Extreme Poverty, Inequality and Economic Growth in Indonesia, and the relationship between Indonesia's economic growth and Extreme Poverty itself. The data used is quantitative secondary data from TNP2K for extreme poverty data, and GRDP for each province, namely 34 provinces in Indonesia in the 2021-2022 period. The analysis technique used is Klassen Typology Analysis and Partial Correlation Analysis. Based on the research results show that extreme poverty has a strong relationship with economic inequality. As well as the relationship between Extreme Poverty, Inequality and Economic Growth as a control variable does not really have a big impact on changes in Indonesia's economic development.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat maupun pribadi dalam memenuhi kebutuhan pokok ekonominya untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005). Beragam masalah kemiskinanpun tidak hanya berdampak pada lingkungan ekonomi saja melainkan menjadi masalah sosial dan mempengaruhi instabilitas politik dalam negeri. Tercatat dalam sejarah bahwa reformasi pada tahun 1998 di Indonesia diawali oleh krisis keuangan Asia dan berdampak pada tertekannya masyarakat marginal yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga, tidak heran apabila Kemiskinan selalu menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan karena berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum (Chen dan Ravallion, 2012). Tantangan

terkait kemiskinan terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai oleh Pemerintah Indonesia. Setelah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, pandemi berkepanjangan menjadi suatu tantangan baru. Pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan dilakukan Pemerintah dengan penerapan beberapa instrumen kebijakan dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan. Tercatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia yang semua berada pada angka 24 persen di tahun 1999 menjadi 9,8 persen pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang merupakan rangkuman tujuh belas tujuan yang disepakati oleh lebih dari seratus sembilan puluh negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang dipublikasi pada 21 oktober 2015. Tujuan ini rencananya dicapai hingga tahun 2030 (Sachs, J. D, 2012). Salah satu tujuan utama yang menjadi fokus oleh negara-negara di dunia dalam SDGs adalah tanpa kemiskinan (no poverty) sehingga tidak ada lagi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Kemiskinan ekstrem pada dasarnya dihitung berbasis kebutuhan dasar, dimana Bank Dunia mengambil informasi tentang kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar 1,90 dollar AS per hari per orang sebagai garis kemiskinan ekstrem global. Sehingga penduduk dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ekstrem apabila berada di bawah kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (Purchasing Power Parity).

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam melaksanakan SDGs tentunya memiliki keinginan besar dalam memberantas kemiskinan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwasanya penurunan kemiskinan ekstrem untuk dapat dituntaskan lebih cepat enam tahun dibanding tujuan yang tercantum dalam SDGs yaitu pada akhir tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi juga peningkatan angka kemiskinan ekstrem pertama kali sejak tahun 1998 sejak krisis keuangan yang mengguncang ekonomi global. Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 juga tercatat meningkat hingga mencapai angka 4 persen atau 10,86 juta jiwa (Jawapos, 2022). Padahal jika dilihat kebelakang, beberapa upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem telah mendorong pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sejalan dengan tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami perlambatan. Hasil penelitian Ravallion (2012) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lainnya akan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain melihat dampak kemiskinan suatu negara terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga mempengaruhi aspek sosial lainnya.

Dampak dari kemiskinan dan pembangunan ekonomi juga telah dikaitkan banyak pada penelitian sebelumnya, (Nakabashi, 2018) menemukan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan ekonomi di kota-kota negara Brazil, selain variabel lainnya yaitu pendapatan per kapita pekerja, dan investasi. Selain kemiskinan, ketimpangan ekonomi juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pada periode terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia, Gini Ratio mengalami kenaikan menjadi 0,384 dari kondisi kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 0,381.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat ketimpangan memerlukan perbaikan dalam distribusi pendapatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan dampak yang nyata pada penurunan tingkat kemiskinan (Iniguez-Montiel, 2014). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 5 tahun kebelakang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tercatat rata-rata berada pada angka 5,1 persen. Namun, dikarenakan situasi pandemi sebagaimana disebutkan di atas, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -2,7 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 3,7 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui kebijakan yang menasar pada pemulihan ekonomi masyarakat miskin terdampak. Sehingga dari uraian di atas, perlu dilakukan kajian bagaimana hubungan antara ketiga

variabel tersebut, dengan tujuan Menambah pemahaman dan pengetahuan empiris mengenai dampak kemiskinan ekstrem dan ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menganalisis hubungannya antara kemiskinan ekstrem, ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta memperdalam konsentrasi keilmuan yang dialami yaitu perencanaan dan pengembangan Kawasan, serta menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan oleh Pemerintah serta dapat dikaji lebih lanjut di masa mendatang sesuai dengan kondisi kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai produksi output lebih banyak pada suatu negara disertai dengan perubahan dalam pengaturan teknis dan kelembagaan dimana output tersebut diproduksi dan didistribusikan (Kindleberger, 2012). Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) karena secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode atau kurun waktu satu tahun. Keseluruhan output final dari barang dan jasa adalah merupakan total keseluruhan dari ekonomi negara, di dalam territorial negara, oleh penduduk maupun bulan penduduk, dan tidak melihat alokasi antara dalam dan luar negeri (Todaro dan Smith, 2014: 17). Gambaran yang didapat dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan riil nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara, juga menggambarkan pendapatan masyarakat yang berada pada suatu negara.

Kemiskinan

Hampir di setiap negara termasuk di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius. Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan "utama" dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pembangunan ekonomi untuk memberantas kemiskinan masih menjadi tema serta agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Dalam RPJMN 2020 - 2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui, dalam RPJMN 2020 - 2024 ditetapkan sasaran makro pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan antara 6 - 7 persen pada akhir tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2021)

Kemiskinan absolut (Absolute Poverty) didefinisikan sebagai suatu situasi ketidakmampuan atau hanya nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan minimum (Todaro dan Smith, 2014). Kemiskinan merupakan kondisi deprivasi (kekurangan) dalam kesejahteraan. Lebih lanjut, pengukuran kesejahteraan itu sendiri dilakukan dengan tiga cara, yaitu kesejahteraan karena memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa ambang batas standar yang ditentukan. Pendekatan kedua untuk melihat kesejahteraan adalah akses seseorang terhadap kebutuhan akan jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan, tempat berlindung, perawatan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan terakhir adalah kemampuan untuk memiliki peran atau berfungsi dan memberikan dampak bagi kehidupan sosial di sekitarnya (Houghton dan Khandker, 2009).

Badan Pusat Statistik menuturkan kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin ini sendiri nantinya akan dijadikan landasan dalam menyediakan gambaran kemiskinan atau tingkat kemiskinan pada daerah tertentu maupun secara

nasional. (Nasution et. al., 2018) disebutkan bahwa angka kemiskinan memiliki beberapa fungsi dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, yang berhubungan dengan kebijakan dan rencana peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sektoral;
2. Sebagai target sasaran program pembangunan, yang berdasarkan pada letak geografis dari individu dan rumah tangga yang termasuk dalam penduduk miskin;
3. Sebagai penentu alokasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;
4. Sebagai indikator pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan, termasuk pencapaian RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
5. Sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah.

Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem yang merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996).

Perbedaan antara miskin dan miskin ekstrem dapat dilihat dari sisi pengeluaran, untuk miskin ekstrem yaitu seseorang yang kebutuhan atau pengeluaran sehari-harinya hanya Rp.10.739 per hari dan hanya Rp. 322.170 per bulan. Sementara miskin biasa pengeluarannya Rp. 15.750 per hari dan 472.525 per bulan.

Secara global, sebanyak 20 persen orang-orang paling miskin di dunia menerima hanya sebesar 1,5 persen dari total pendapatan masyarakat di dunia. Sebanyak 20 persen koresponden yaitu kira-kira 1,2 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem, yaitu kurang dari \$1,25 per hari (berdasarkan Purchasing Power Parity/PPP). Setidaknya dibutuhkan 2 persen dari kekayaan dan pendapatan 10 persen orang-orang paling kaya di dunia untuk melepaskan masyarakat dunia dari kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang tinggi diantara masyarakat yang kaya dan miskin di dunia (Todaro dan Smith, 2014).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang nilainya setara dengan \$1.9 PPP. Penentuan garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukuran menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan /TNP2K). Penanggulangan kemiskinan ekstrem Indonesia diupayakan secara khusus berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan konsolidasi, integrasi, kepastian tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Penanggulangan ini dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions dengan dua pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Serta melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.

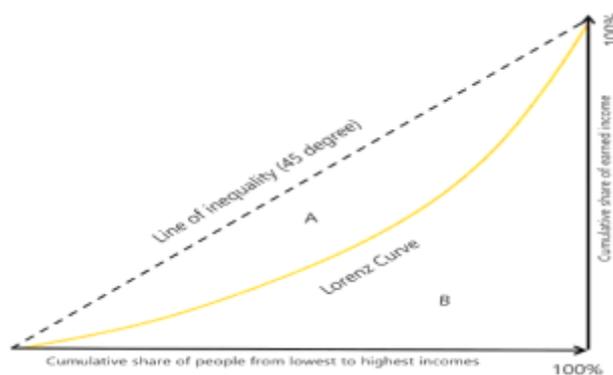
Ketimpangan

Ketimpangan (inequality) memiliki pengertian fokus pada distribusi kepada kepemilikan, seperti pendapatan atau konsumsi, diantara seluruh populasi (masyarakat). Dalam konteks analisis kemiskinan, ketimpangan pada dasarnya berdasarkan kepada pengukuran keyakinan bahwa kesejahteraan individu bergantung kepada posisi relatif ekonomi mereka terhadap orang lain yang berada pada kelompok masyarakat yang sama (Haughton dan Khandker, 2009). Ketimpangan pula merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan karena berfokus pada keseluruhan populasi dan tidak hanya fokus kepada masyarakat miskin.

Pengukuran ketimpangan secara umum biasanya diukur dengan menggunakan beberapa

metrik ukuran ketimpangan ekonomi. Adapun yang paling sering digunakan adalah rasio gini atau indeks gini. Koefisien gini membandingkan dua area kurva Lorenz, yang merupakan hubungan antara populasi dengan penguasaan pendapatan (kekayaan) diantara masyarakat. Dalam menentukan besarnya koefisien Gini, digambarkan persentase kumulatif rumah tangga (dari yang miskin hingga kaya) pada garis horizontal dan persentase kumulatif dari pengeluaran masyarakat (atau pendapatan) pada garis vertikal. Garis diagonal menggambarkan kesetaraan yang sempurna, oleh karena pada dasarnya koefisien Gini didefinisikan dengan $A/(A+B)$, dimana A dan B adalah area yang ditunjukkan pada gambar. Semakin kecil nilai koefisien gini maka semakin menunjukkan tingkat ketimpangan semakin berkurang tetapi apabila nilai koefisien gini adalah sebesar 1, hal ini berarti bahwa ketimpangan sangat tinggi.

Gambar 1 Kurva Lorenz



Sumber : Pratama, (2022)

Berdasarkan (cerdasco.com, 2022) Penyebab ketimpangan ekonomi pada dasarnya tergantung dengan kondisi negara-negara tersebut, akan tetapi pada umumnya ketimpangan ekonomi disebabkan oleh:

1. Tingkat pengangguran tinggi
2. Kondisi pekerjaan yang buruk
3. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
4. Diskriminasi ekonomi
5. Infrastruktur yang buruk
6. Ukuran Keluarga
7. Konsentrasi kekayaan

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, mengambil objek penelitian pada Analisis Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Analisis yang dimaksud adalah untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel di setiap provinsi di Indonesia adapun ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dari 34 Provinsi di Indonesia (tidak termasuk 3 Provinsi baru karena ada potensi data yang tidak tersedia), periode tahun 2021-2022. Data yang digunakan data sekunder (kuantitatif), bersumber dari Badan Pusat Statistik, data Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan TNP2K serta website yang mungkin berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini meliputi :

Analisis Tipologi Klassen

Metode Ini merupakan klarifikasi untuk melihat pola sebaran dan fokus kebijakan yang bisa pemerintah ambil dalam proses pemberantasan kemiskinan ekstrem. Metode ini menggunakan data sekunder dan berdasarkan pada dua indikator utama yaitu data indeks Kemiskinan ekstrem provinsi pada tahun 2021-2022 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi serta data persentase ketimpangan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hasil akhir metode ini mengklarifikasi pola sebaran daerah yang terdampak dari kemiskinan ekstrem menjadi empat kategori yaitu :

- Daerah maju dan tumbuh cepat merupakan daerah dengan rata-rata kemiskinan eskترم dan Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
- Daerah maju tapi tertekan merupakan daerah dengan kemiskinan ekstrem di bawah rata-rata nasional tapi Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional
- Daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan rata-rata kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi nasional.
- Daerah relatif tertinggal merupakan daerah dengan rata-rata kemiskinan ekstrem tinggi di atas rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata.

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Antara Kemiskinan Ekstrem dan Pertumbuhan Ekonomi (Proyeksi)

Pertumbuhan Ekonomi kemiskinan ekstrem	$PE_i = PEn$	$PE_i < PEn$
$KE_i = KE_n$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$KE_i < KE_n$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber : (Sjafrizal, 1997)

Keterangan :

KE_i : Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Provinsi ke i

KE_n : Rata-rata jumlah Kemiskinan Ekstrem Nasional

PE_i : Persentase pertumbuhan ekonomi provinsi ke i

PEn : Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi.

Sedangkan klasifikasi daerah dengan rata-rata presentse ketimpangan dan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang memiliki karakteristik yang berbeda antara lain yaitu :

- Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh, merupakan daerah dengan rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata.
- Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah dengan ketimpangan ekonomi di bawah rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
- Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat, merupakan daerah dengan rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Provinsi nasional.
- Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal, merupakan daerah dengan rata-rata ketimpangan ekonomi tinggi di atas rata-rata nasional, tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata.

Sementara itu, tipologi antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Tipologi Antara Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi

	Pertumbuhan	$PE_i = PEn$	$PE_i < PEn$
Ketimpangan			
$KT_i = KT_n$		Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$KT_i < KT_n$		Daerah maju tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber : (Sjafrizal, 1997)

Keterangan :

KT_i : Jumlah Ketimpangan Ekonomi di Provinsi ke i

KT_n : Rata-rata jumlah Ketimpangan Ekonomi Nasional

PE_i : Persentase pertumbuhan ekonomi provinsi ke i

PEn : Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi.

B. Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial (partial correlation) merupakan perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi pearson. Jika korelasi sederhana melibatkan satu variabel terikat (dependent) dan satu variabel bebas (independent), maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya terbagi atas dua penggunaan yaitu satu variabel bebas sebagai yang memiliki hubungan dengan variabel terikat dan variabel bebas yang lainnya sebagai variabel kontrol dimana variabel ini diduga mempengaruhi hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, analisis korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh (Irianto, 2006).

Dalam menghitung koefisien korelasi dengan parsial, dilakukan terlebih dahulu perhitungan korelasi tunggal, dengan rumus sebagai berikut:

Dimana :

r = Koefisien Korelasi Pearson

n = Jumlah data / banyaknya sampel

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X = Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan.

Untuk lebih mudah menjelaskan besar atau kecilnya hubungan dalam koefisien korelasi berikut pedoman arti korelasi (r) :

Tabel 3. Pengukuran Hasil Korelasi

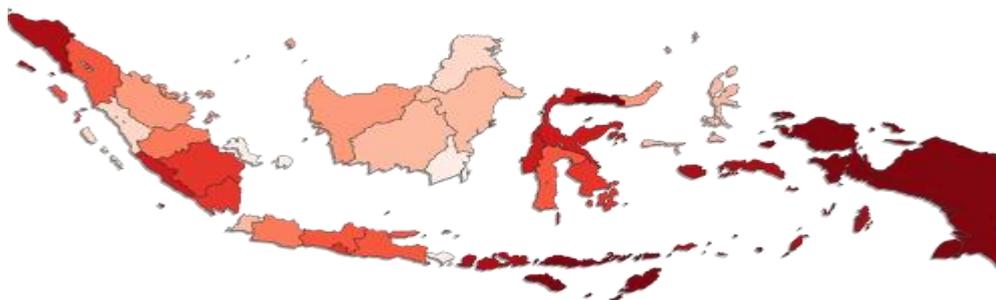
Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah Kekuatan dan koefisien korelasi
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapatkan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi dalam dua tahun terakhir tahun 2021-2022 adalah Provinsi Papua yang mencapai lebih dari 10 persen, dan diikuti Indonesia bagian timur lainnya seperti Papua Barat di atas 9 persen dan Nusa Tenggara Timur yang mencapai lebih dari 6 persen penduduk dari rata-rata Provinsi Nasional di Indonesia. Sedangkan 31 Provinsi lainnya di Indonesia tingkat kemiskinan ekstrem penduduknya tidak mencapai 5 persen.

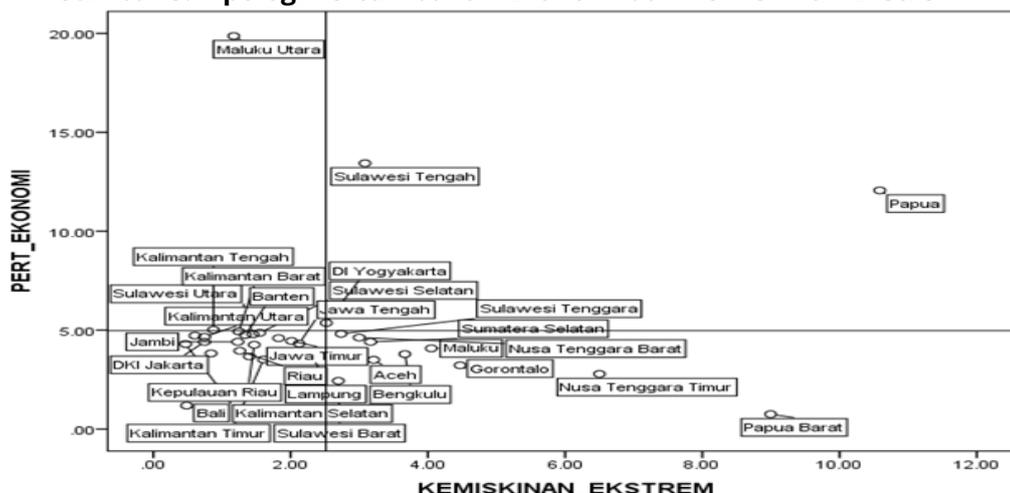
Gambar 2. Peta Sebaran Rata-rata Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



Sumber : Data TNP2K, 2022 Diolah

Data di atas memperlihatkan hasil pemetaan sebaran kemiskinan ekstrem dari skala 0 sampai dengan 8 yang dimaksud dari daerah yang paling rendah sebaran kemiskinan ekstrem sampai dengan daerah yang paling tinggi tingkat sebaran kemiskinan ekstrem pada wilayah Provinsi tersebut. Mayoritas kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia masih di dominasi oleh wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem pada masing-masing daerah provinsi di Indonesia masih belum merata dalam upaya penanganannya, sehingga masih ada beberapa provinsi selain Provinsi Papua dan sekitarnya yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrem seperti Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan delapan Provinsi lainnya.

Gambar 3. Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber : Output SPSS Diolah,2023

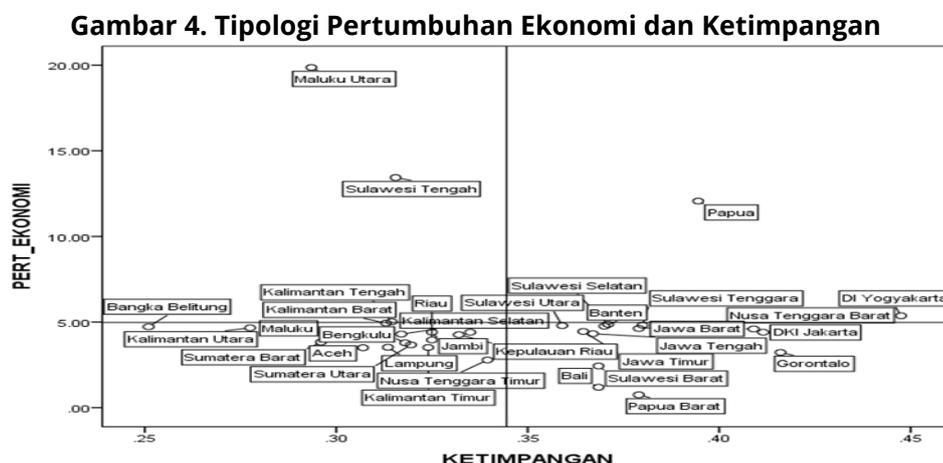
Terdapat empat kuadran prioritas penanganan kemiskinan ekstrem terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pemetaan wilayah pada masing-masing Provinsi di Indonesia yang dapat dilihat

pada Gambar di atas. Pertama daerah dengan klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat terdapat tiga provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua, dengan rata-rata kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Dengan kata lain peningkatan kemiskinan ekstrem yang terjadi pada provinsi tersebut mendorong peningkatan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi pada 3 provinsi tersebut dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, PDRB yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan ekstrem dan lambannya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Selanjutnya dalam kuadran kedua, dengan klasifikasi daerah maju tapi tertekan terdapat dua Provinsi di dalamnya yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kalimantan tengah, yang berarti tingkat kemiskinan ekstrem di bawah rata-rata nasional tetapi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada kedua provinsi ini cukup baik dalam dua tahun terakhir maluku utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,87 persen dan Kalimantan tengah sebesar 5,02 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada daerah Maluku utara dan Kalimantan tengah di bawah rata-rata kemiskinan ekstrem nasional. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap sebaran kemiskinan ekstrem dua Provinsi tersebut.

Pada kuadran ketiga, dengan klasifikasi daerah berkembang cepat terdapat sepuluh Provinsi didalamnya yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku serta Provinsi Papua barat. Daerah tersebut merupakan dengan rata-rata kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi nasional. Pada sepuluh provinsi tersebut tingkat pendapatan daerahnya dengan penduduk miskin ekstrem berada di bawah rata-rata nasional.

Keempat, pada kuadran ini dengan klasifikasi daerah relatif tertinggal yang merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi rendah di bawah rata-rata nasional, tetapi kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional. Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi kuadran ini terdapat 19 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di provinsi tersebut belum terlalu memberi dampak penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, karena tidak meratanya mobilisasi perputaran ekonomi dan tingginya ketimpangan ekonomi maupun pendapatan sehingga pemberantasan kemiskinan ekstrem belum menyentuh keseluruhan bagian dari daerah masing-masing provinsi tersebut.



Sumber : Output SPSS Diolah,2023

Empat klasifikasi prioritas di atas dengan prioritas pertama terdapat dua provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Papua dengan klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, yang berarti daerah tersebut rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Pada provinsi ini dapat diartikan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi pendorong terhambatnya pertumbuhan ekonomi provinsi daerah tersebut. Ketimpangan pendapatan yang mengartikan tidak seimbangannya jalan perekonomian masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak terjangkau dalam pengembangan perekonomian individu maupun keluarga, seperti di Provinsi Papua ketimpangan juga dapat disebabkan terbatasnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan yang rendah, minimnya sarana maupun prasarana umum, mobilitas transportasi yang terbatas sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak bisa tumbuh dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terhambat pada daerah tersebut sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta walau berada dalam daerah Pulau Jawa jika dibandingkan PDRB Provinsi tersebut dengan PDRB Provinsi Jawa lainnya sangat jauh berbeda.

Pada klasifikasi ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka ketimpangan pendapatan maupun ekonomi demi mengembangkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Pada klasifikasi prioritas kedua terdapat tiga Provinsi yang masuk dalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan. Yang merupakan daerah yang ketimpangan ekonominya di bawah rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi pada provinsi ini masih terkendali tetapi dengan rendahnya ketimpangan ekonomi pada provinsi tersebut belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, terdapat 15 Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, yang berarti rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Provinsi nasional. Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat terdapat pada prioritas tiga, hal ini menunjukkan adanya kesinergian antara masyarakat kelas atas maupun menengah kebawah sehingga tingkat ketimpangan tidak begitu mencolok yang mengakibatkan jalannya roda perekonomian. Kinerja pemerintah serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan ekonomi masyarakat cukup berjalan dengan baik.

Selanjutnya, pada Proiritas keempat, terdapat 14 Provinsi yang masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal dimana daerah tersebut dengan rata-rata ketimpangan ekonomi tinggi di atas rata-rata nasional, tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional. Adapun Provinsi yang masuk dalam prioritas ini adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Maluku. Pada kondisi ini kinerja maupun kebijakan pemerintah dalam meingkatkan pertumbuhan ekonomi sudah terlaksana dengan baik sehingga perekonomian pada provinsi tersebut bergerak maju, akan tetapi dalam memberantas ketimpangan ekonomi belum berjalan dengan maksimal sehingga belum mencapai hasil yang baik. Tingginya tingkat ketimpangan ekonomi mengakibatkan masyarakat dengan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan maupun pelayanan dasar seperti makanan yang cukup, fasilitas kesehatan yang baik maupun pendidikan yang tepat. Hal ini memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat dengan golongan pendapatan rendah tersebut, seperti terhambatnya proses pembangunan manusia (IPM), maupun perlakuan yang adil dalam sosial masyarakat.

Tabel 4. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Di Indonesia

Control Variables			KEMISKINAN_E KSTREM	KETIMPANGAN	PERT_ EKONOMI
-none ^a	KEMISKINAN_ EKSTREM	Correlation	1.000	.424	.068
		Significance (2-tailed)	.	.032	.703
		df	0	32	32
	KETIMPANGAN	Correlation	.424	1.000	-.149
		Significance (2-tailed)	.032	.	.399
		df	32	0	32
	PERT_EKONOMI	Correlation	.068	-.149	1.000
		Significance (2-tailed)	.703	.399	.
		df	32	32	0
PERT_ EKONOMI	KEMISKINAN_ EKSTREM	Correlation	1.000	.338	
		Significance (2-tailed)	.	.054	
		df	0	31	
	KETIMPANGAN	Correlation	.338	1.000	
		Significance (2-tailed)	.054	.	
		df	31	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

Sumber : Output SPSS Diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari analisis korelasi, dari Tabel output pertama menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel Kemiskinan Ekstrem dengan Ketimpangan. Dari output di atas diketahui nilai koefisien korelasi (Correlations) sebesar 0,424 (positif) dan nilai Significance (2-tailed) adalah $0,032 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan Kemiskinan ekstrem dengan Ketimpangan. Sementara nilai Correlations sebesar 0,424 hal ini menunjukkan variabel kemiskinan ekstrem memiliki hubungan yang kuat dengan ketimpangan ekonomi. Yang mengartikan ketimpangan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Tabel output kedua Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel Kemiskinan Ekstrem dengan Ketimpangan setelah memasukkan Pertumbuhan Ekonomi dalam analisis. Dari Tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi (Correlations) menjadi 0,338 (bernilai positif dan kategori hubungan lemah) dengan nilai Significance (2-tailed) sebesar $0,054 > 0,05$, berarti bahwa hubungan antara Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel kontrol tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dalam pengembangan ekonomi Indonesia atau tidak terlalu berpengaruh signifikan, yang mengartikan masih banyak faktor lain yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk melihat pola sebaran wilayah, dapat ditarik kesimpulan dua provinsi besar di Indonesia dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan ekonomi yang tinggi ada pada Provinsi Papua serta DI Yogyakarta. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi kedua provinsi ini tergolong tinggi tetapi jumlah PDRB di Provinsi Papua maupun Provinsi DI Yogyakarta tidak

memberikan kontribusi yang tinggi pada PDB nasional karena jumlah PDRB provinsi tersebut masih di bawah rata-rata PDRB nasional.

Provinsi Papua memerlukan perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah karena dalam dua tahun terakhir tingkat kemiskinan ekstrem mencapai lebih dari 10 persen dari rata-rata nasional dan ketimpangan ekonomi provinsi ini sangat tinggi, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti terbatasnya pengembangan sektor pendidikan, minimnya ketersediaan infrastruktur jalan yang baik agar mempermudah akses transportasi, keterbatasan ketersediaan air minum yang layak, dan kurangnya akses sanitasi yang baik.

Sedangkan Provinsi DI Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam kategori prioritas utama, dalam sebaran wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, ketimpangan ekonomi yang tinggi tidak seperti provinsi Jawa lainnya dikarenakan, upah minimum yang rendah sehingga daya beli masyarakat juga ikut rendah, sehingga pendapatan PDRB provinsi rendah, ketimpangan dalam pembangunan daerah dan tingginya tingkat pengangguran.

Dampak kemiskinan ekstrem dan ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan nilai korelasi 0,338 yang berarti berpengaruh positif, tetapi Significance (2-tailed) sebesar $0,054 > 0,05$, terlihat bahwa hubungan antara Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel kontrol tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dalam pengembangan ekonomi Indonesia atau tidak terlalu berpengaruh signifikan.

Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial hubungan antara kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,068 yang berarti terdapat hubungan yang sangat erat atau positif antara kedua variabel yang mengartikan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saran

1. Hasil penelitian ini bagi pemerintah di Indonesia dapat menjadi rekomendasi dalam memfokuskan pemberantasan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi pada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas utama di Indonesia karena ketimpangan ekonomi yang tinggi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan ekstrem yang tinggi pula, terutama pada wilayah-wilayah Indonesia bagian timur agar menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur baik sarana maupun prasarana masyarakat umum seperti akses jalan transportasi, sanitasi rumah tangga yang baik dan peningkatan program pendidikan yang menjangkau kedaerah serta mengembangkan program-program ekonomi seperti bantuan UMKM dan kebijakan bantuan untuk usaha masyarakat mengengah kebawah.
2. Pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meninjau kembali kebijakan yang telah dibuat untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan mengevaluasi kebijakan sebelumnya apakah sudah berjalan dengan maksimal atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Mengalokasikan dana khusus untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya seperti penyaluran dana desa, kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, memberi pelatihan bagi pendidikan formal maupun non formal dalam menggali potensi yang dimiliki masyarakat, memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan tahun penelitian yang lebih Panjang, sehingga dapat lebih detail dalam penelitian dan kebijakan yang dapat diambil lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2021). Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021. ISSN 2502-7484 Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Breunig, R., & Majeed, O. (2020). Inequality, Poverty and Economic Growth. *International Economics*, 161, 83–99. doi:10.1016/j.inteco.2019.11.005.
- Chen, S., & Ravallion, M. (2012). More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World. *Review of Income and Wealth*, 59(1), 1–28. doi:10.1111/j.1475-4991.2012.00520.
- Doyle, M. W., & Stiglitz, J. E. (2014). Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal, 2015–2030. *Ethics & International Affairs*, 28(1), 5-13.
- Haughton, Jonathan & Khandker, S. R. (2009), *Handbook On Poverty And Inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank: Washington, DC.
<https://cerdasco.com/ketimpangan-ekonomi/> (diakses 16 juni 2022)
<https://www.jawapos.com/nasional/14/06/2022/sebanyak-1086-juta-jiwa-hadapi-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia/> (diakses 14 juni 2022)
- Iniguez-Montiel, A. J. (2014). Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992–2008). *World Development*, 59, 313–326. doi:10.1016/j.worlddev.2014.01.011
- Irianto, Agus. (2006). *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasi*. Kencana. Jakarta.
- Modul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (<https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies>) diakses 11 juli 2022
- Nakabashi, Luciano, (2018), "Poverty and Economic Development: Evidence for the Brazilian States," *Economia*, 445-458.
- Nasution, F. N., Mariatin, E., & Zahreni, S. (2018). The influence of career development and organizational culture on employee performance. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(01), 57-65.
- Nugroho, D., Asmanto, P., Adji, A., & Hidayat, T. (2020). Leading Indicators Of Poverty In Indonesia : Application In The Short-Term. TNP2K Working Paper 49.
- Pratama, R. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendidikan Dan Rasio Gini Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Sibolga Periode 2022-2021. *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 193-201.
- Ravallion, Martin (2012). Why Don't We See Poverty Convergence?. *American Economic Review*, 102(1), 504–523. doi:10.1257/aer.102.1.504
- Sachs, J. D. (2012). From Millennium Development Goals To Sustainable Development Goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206-2211.

- Sjafrizal, S. (1997). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia Bagian Barat. *Jurnal Buletin Prisma*, 3(3), 27-38.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Todaro, Michael P & Smith, S.C. (2014). *Economic Development: 12th Edition*. Pearson: New York.
- Yoshida, N., Uematsu, H., & Sobrado, C. E. (2014). Is Extreme Poverty Going To End? An Analytical Framework to Evaluate Progress in Ending Extreme Poverty (January 1, 2014). World Bank Policy Research Working Paper, (6740).